



Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu

P-ISSN 2656-7202 E-ISSN 2655-6626

Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2019

DOI: <https://doi.org/10.35961/perada.v2i1.30>

ETIKA RELIGIUS MASYARAKAT MELAYU: KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN RAJA ALI HAJI

Muhammad Faisal

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

faisal@stainkepri.co.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan menggambarkan etika religius masyarakat Melayu dalam pemikiran Raja Ali Haji. Dalam perspektif masyarakat Melayu, persoalan etika yang menyangkut tentang keabsahan suatu perbuatan memang menjiwai spektrum pemikiran Melayu. Semenjak *mangkatnya* Sultan Mahmud Syah tahun 1699 dari dinasti terakhir kesultanan Melaka, menandai titik awal terjadinya perubahan radikal dalam etika masyarakat Melayu. Dalam konteks ini, perkembangan pemikiran etika Melayu mulai mencari bentuknya secara kritis. Salah satu pemikir Melayu yang sangat *concern* terhadap persoalan ini adalah Raja Ali Haji. Beliau berpendapat, persoalan baik dan buruknya suatu tindakan tidak lagi di cari dalam suatu bingkai tunggal kepemimpinan feodal, akan tetapi lebih kepada faktor-faktor non-struktural, seperti keberadaan *syara'*, pemikiran-pemikiran keagamaan maupun unsur etnisitas yang semakin memperkaya pandangan etika dalam tradisi Melayu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer karya-karya Raja Ali Haji, seperti *Tuhfatun Nafis*, *Silsilah Melayu Bugis*, *Gurindam XII*, *Muqaddimah fi Intizham*, *Tsamarat al-Muhimmah*, *Kitab Pengetahuan Bahasa*, *Bustanul Katibin* dan sumber sekunder berupa tulisan dan naskah terkait dengan memakai content analysis. Ada empat hal yang menjadi poin penting dalam etika masyarakat Melayu menurut Raja Ali Haji yang harus diperhatikan, yaitu moralitas penguasa, yang terdiri dari prinsip keadilan, musyawarah dan persamaan, keta'atan pada syari 'at, bahasa serta pembentukan lingkungan bermoral.

This paper aims to describe the religious ethics of Malay society in Raja Ali Haji's thoughts. In the perspective of Malay society, ethical issues related to the validity of an act inspired the spectrum of Malay thoughts. Since the death of Sultan Mahmud Syah in 1699 from the last dynasty of the Melaka Sultanate, it was marked as the beginning of a radical change in the ethics of Malay society. In this context, the development of Malay ethical thoughts began to critically look for its form. One of Malay thinkers who very concerned about this issue was Raja Ali Haji. He argued that the problem of good and bad of an action was no longer sought in a single frame of feudal leadership, but rather non-structural factors like the existence of *syara'*, religious thoughts or even elements of ethnicity enriching the ethical view in tradition Malay. The approach used in this study was a qualitative

approach with Raja Ali Haji's works as primary sources. They included *Tuhfatun Nafis*, *Silsilah Melayu Bugis*, *Gurindam XII*, *Muqaddimah fi Intizham*, *Tsamarat al-Muhimmah*, *Kitab Pengetahuan Bahasa*, *Bustanul Katibin*. While the secondary sources were the related writing and manuscripts using content analysis. According to Raja Ali Haji, there are four important things in Malay society ethics which must be considered. They are included in the leaders' morality consisting of the principles of justice, deliberation and equality, obedience to Islamic law, language and the establishment of a moral environment.

Kata Kunci : *etika religus, masyarakat Melayu, Raja Ali Haji*

PENDAHULUAN

Istilah etika dalam kajian filsafat berkaitan dengan pengetahuan tentang sesuatu yang baik dan buruk dari tindakan dan perilaku manusia. Dengan kata lain, etika merupakan usaha dengan akal budinya untuk menyusun suatu teori mengenai penyelenggaraan hidup yang baik. Dengan demikian, etika bekerja dalam level teori, berbeda dengan moralitas yang berkenaan dengan tingkah laku yang konkrit. Nilai-nilai etis yang dipahami, diyakini dan berusaha untuk diwujudkan dalam kehidupan nyata kadangkala disebut dengan etos.¹

Memahami pola pikir etika sangat penting bagi perkembangan suatu masyarakat. Ini bukan saja memberikan warna dan corak suatu masyarakat, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai moral yang menjadi dasar pembentukan pola hidup masyarakat tersebut. Pada masyarakat tradisional Melayu, persoalan etika ini sangat penting karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari identitas dan cara pandang Melayu terhadap tradisi, alam dan lingkungannya. Hal ini terutama menyangkut tentang pola adat dan tradisi yang menjiwai spektrum pemikiran Melayu, dimana kedudukan raja dan fungsinya yang dijabat keturunannya secara turun temurun bukan saja memiliki kekuasaan secara sosial, politik

dan hukum, tetapi juga secara spritual sebagai pihak yang dapat melegitimasi dari keabsahan tindakan Melayu. Konsep ini juga memberikan kepada raja sejumlah hak-hak keistimewaan dan selalu menempatkannya dalam posisi paling atas dalam struktur sosial masyarakatnya, serta menjadi dasar bagi tuntutan loyalitas mutlak yang harus ditunjukkan oleh rakyat kepadanya.² Salah satu metode utama yang dipaksakan oleh penguasa-penguasa feodal Melayu sebagaimana terdapat dalam literature Melayu tradisional, untuk menjamin berlangsungnya kekuasaan dan kedudukan mereka adalah melalui tersebarnya mitos. Sebagai contoh, dalam sejarah Melayu dikatakan bahwa asal-usul raja dikaitkan secara erat dengan seorang tokoh yang dianggap sebagai keturunan Zulkarnain.³ Demikian pula halnya dengan legitimasi dan kelangsungan kekuasaan diperkuat oleh praktek pemujaan terhadap kekuatan-kekuatan magisnya, bahkan kadangkala terhadap daulat atau sifat kedewaannya dan ancaman pembalasannya. Memberontak terhadap raja berarti pengingkaran terhadap perintah raja dan dianggap sebagai suatu tindakan khianat (derhaka) dan merupakan dosa yang tak terampuni. Tindakan durhaka tidak hanya di hukum dalam pengertian yuridis konkrit, tetapi juga dalam arti magis-

¹Paul W. Taylor, *Problem of Moral Philosophy* (California: Deckenson Publishing Company, 1985). h.3

²Husin Munthalib, *Islam Dan Enisitas: Perspektif Politik Melayu* (Jakarta: LP3ES, 1996), h.19-20.

³Tun Seri Lanang, *Sejarah Melayu*, ed. by Shellabear (Kuala Lumpur: Fajar Bhakti, 1922), h.15.

religius, yang disebut dengan istilah tulah. Dalam sejarah Melayu misalnya, dilukiskan tulah yang menimpa Sang Rajuna Tapa, bendahara Raja Iskandar Syah di Singapura, mendapat tulah karena khianat kepada raja. Rumahnya roboh dan ia sendiri bersama istrinya menjadi batu.⁴

Cara pandang terhadap moralitas yang berkembang dari kondisi ini, pada masa belakangan mulai mencari bentuknya secara kritis. Studi yang dilakukan oleh Chandrasekar Pilay (Chandra Muzaffar) yang dikutip kembali oleh Husin Mutalib⁵ mengenai nilai-nilai tradisonal masyarakat Melayu menyimpulkan bahwa; kendatipun kelas-kelas penguasa mempunyai beberapa gagasan mengenai keadilan, tujuannya selalu untuk mempertahankan kekuasaannya *vis a vis* dihadapan kekuasaan lain. Jika ada kekuasaan lain yang cukup penting untuk mengimbangi kesewenang-wenangan rezim, maka itu adalah Islam. Walaupun demikian, keberhasilannya terbatas karena kuatnya sentimen-sentimen feodal dan tindakan-tindakan refresif terhadap rakyat yang memilih mengabaikan hukum. Hal ini terjadi karena tradisi dan adat yang berkembang dalam masyarakat dimana persoalan baik dan buruknya suatu tindakan masih diletakkan dalam bingkai tunggal kepemimpinan feodal sebagai pihak yang memiliki wewenang mutlak dalam memberikan tafsiran dan penentu bagi kehidupan di masyarakat.

Namun, semenjak *mangkatnya* Sultan Mahmud Syah tahun 1699M dari dinasti terakhir kesultanan Malaka dan beralih ke dinasti Bendahara,⁶ menandai titik awal terjadinya perubahan radikal dalam etika

masyarakat Melayu. Persoalan etika Melayu mulai mencari bentuknya ketika moralitas seseorang atau suatu masyarakat mulai ditinjau kembali secara kritis. Dalam konteks ini, kedudukan raja dan fungsinya yang dijabat keturunannya secara turun-temurun sebagai pihak yang dapat melegitimasi dari tindakan Melayu mengalami perubahan struktur yang mengakibatkan terjadinya pergeseran cara pandang terhadap etika masyarakat Melayu. Dalam konteks ini, perkembangan pemikiran etika Melayu mulai mencari bentuknya secara kritis.

Sepanjang literature Melayu yang mengungkapkan persoalan moralitas masyarakat Melayu, seperti *Hikayat Abdullah*,⁷ menganggap perlunya perubahan nilai dan cara pandang Melayu untuk membebaskan dirinya dari masa lalu dan masuk ke alam pemikiran barat modern sebagai suatu bentuk moralitas baru yang perlu dirubah. Berbeda dengan Abdullah, Raja Ali Haji justru menganggap terjadinya perubahan nilai dan pola hidup masyarakat Melayu harus dicari dasar pembenarannya dalam tradisi Melayu sendiri, terutama nilai dasar Islam (alQur'an dan hadis) sebagai pelekut utama tradisi Melayu, karena nilai dasar itulah merupakan identitas Melayu.⁸ Makna identitas kemelayuan sebagai norma perilaku dalam konteks etika yang diungkapkan Raja Ali Haji, menjadi sangat penting untuk diteliti, apabila dikaitkan dengan munculnya persoalan krisis moral yang mengarah kepada krisis identitas. Penelitian ini bukan saja dapat memberikan penjelasan terhadap pemikiran etika Raja Ali Haji yang berkembang dalam segenap karya-karyanya, tetapi juga memberikan warna bagi realitas berkembang dalam masyarakat

⁴*Ibid.*, h.53

⁵Hussin Mutalib, *Islam dan Etnisitas*, h.50

⁶Raja Ali Haji, *Tuhfat Al-Nafis*, ed. by Virginia Matheson (Kuala Lumpur: Fajar Bhakti, 1982), h.1-15.

⁷Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi, *Hikayat Abdullah* (Jakarta: Perdana Press), p.312-314.

⁸Raja Ali Haji, *Kitab Pengetahuan Bahasa*, ed. by Raja Hamzah Yunus (Pekanbaru: Depdikbud, 1986).

Melayu di Kepulauan Riau. Dengan memahami pemikiran etika Raja Ali Haji yang dikembangkannya, bukan saja memberikan kontribusi bagi pembentukan etika religious masyarakat Melayu di Kepulauan Riau, tetapi lebih dari itu adalah dapat memperkuat identitas dalam setiap gerak dinamika sosial kultural masyarakat di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen,⁹ demikian juga pendapat Bandur¹⁰ mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi atau kebiasaan tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara langsung sangat bergantung kepada pengamatan pada manusia dalam lingkungannya sendiri dan berhubungan dengan individu dalam bahasanya dan peristilahannya. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber tertulis yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan. Beberapa sumber dokumen yang dipilih dari karya-karya Raja Ali Haji, yaitu *Tuhfatun Nafis*, *Silsilah Melayu Bugis*, *Gurindam XII*, *Muqaddimah fi Inthizam*, *Tsamarat al-Mubimmah*, *Kitab Pengetahuan Bahasa dan Bustanul Katibin*. Adapun langkah-langkah penelitian, yaitu: pertama, mengkaji biografi Raja Ali Haji, perkembangan pemikiran, sosial, budaya serta sumber pemikirannya sebagai alat analisis terhadap pemikiran etika religiusnya. Kedua, tinjauan terhadap masyarakat Melayu dan etika religius yang melalui telaah bahan rujukan yang terdiri dari buku-buku, tesis, jurnal, disertasi, laporan kajian, naskah lama dan lain-lain. Ketiga, merupakan langkah utama penelitian yaitu meneliti pemikiran etika religius Raja Ali Haji. Dalam pengolahan dan analisa data,

penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yang berangkat dari aksioma bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi itu merupakan dasar bagi ilmu-ilmu sosial.¹¹

BIOGRAFI SINGKAT RAJA ALI HAJI

Raja Ali ibn Raja Ahmad atau yang lebih dikenal dengan Raja Ali Haji. Beliau dilahirkan di Pulau Penyengat pada akhir tahun 1808M dan wafat tahun 1872M. Ayahnya bernama Raja Ahmad ibn Raja Haji Fi Sabilillah dan ibunya bernama Encik Hamidah binti Panglima Malik Selangor.¹² Melalui karya-karyanya seperti *Gurindam XII*, *Tuhfat al-Nafis*, *Tsamarat al-Mubimmah*, dan lain-lain, bisa dikatakan bahwa beliau bukan saja dikenal sebagai seorang pujangga, namun lebih dari itu adalah seorang figur pemikir bangsa Melayu.

Dalam silsilah kerajaan Riau-Lingga, beliau adalah keturunan dari Yang Dipertuan Muda Riau yaitu Opu Daeng Cellak, yang menikah dengan Tengku Mandak saudara perempuan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Sebagai salah satu anggota kerabat kerajaan Riau-Lingga, Raja Ali Haji dididik dalam lingkungan tradisi Melayu dan mendapat kesempatan pendidikan yang lebih baik. Pendidikannya terutarna didapatkan dari para ulama dan para Sayid Arab yang berdatangan ke Penyengat, disamping dari ayahnya sendiri Raja Ahmad, seorang pujangga, penasihat dan ulama kerajaan sekaligus merangkap sebagai wakil resmi Yang Dipertuan Muda Riau VI Raja Ja'far (1805-1831M) yang juga saudara kandungnya sendiri.¹³

⁹Robert C. Bogdan and Sari Kboop Biklen, *Qualitative Research for Education, An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn an Bacon, 1982).

¹⁰Agustinus Bandur, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014).

¹¹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), p.70-79.

¹²Hasan Junus, *Raja Ali Haji: Budayawan Di Gerbang Abad XX* (Pekanbaru: UIR Press, 1986), h.39.

¹³*Ibid.*

Menurut sumber resmi Belanda *Dagh-Register* yang dikutip kembali oleh Muhammad Yusof Hashim¹⁴ bahwa Riau sampai abad kesembilan belas merupakan pelabuhan yang bebas dan ramai dikunjungi oleh para saudagar Arab, India, Bugis, Banjar, Cina, Jawa dan Siam. Riau benar-benar telah menjadi suatu kota kosmopolitan. Seperti port-states tradisional Melayu, Riau ramai dikunjungi para pedagang dan santri. Kalangan santri disini termasuk guru-guru dan ulama-ulama Islam semisal dari Timur tengah. Diantara ulama dan Sayid Arab yang berdatangan ke Riau seperti Syeikh Ahmad Jibrati, Haji Hamin al-Banjari, Kyai Barenjang, Haji Abu Bakar, Sayid Hasan al-Hadad dan Habib Syeikh Saqqaf. Sedangkan kitab-kitab yang sering dijadikan rujukan standar belajar di Riau ketika itu, tercatat kitab-kitab seperti *Sabil al-Hidayah*, *Minhaj al-Thalib al-Jauhar*, dan *Ihya' 'Ulumuddin* yang kesemuanya karya Imam al-Ghazali. Tidak ketinggalan kitab *Mir 'ab al-Thullab* karya Syeikh Abdul Ra'uf Sinkel, *kitab Jauharat al-Taubid* dan *Ithafat-Murid* karya Ibrahim al-Lakani serta Bustan al-Arifin karya Syeikh Nasir bin Muhammad. Selain itu diajarkan juga nahwu, sharaf, ushuluddin dan mantiq.¹⁵

Sejak masa mudanya, Raja Ali Haji sering menyertai orang tuanya Raja Ahmad dalam pelbagai ekspedisi, termasuk misi ke Batavia untuk urusan kerajaan. Tujuan dari ekspedisi ini adalah untuk membicarakan masalah perampokan di perairan Riau dan penyerahan peralatan kerajaan kepada Abdul Rahman Syah sebagai sultan.¹⁶ Juru runding dari pihak Riau adalah Engku Sayid

Muhammad Zain al-Qudsy dan Raja Ahmad. Salah seorang juru bahasa dalam pertemuan tersebut adalah P. Roorda van Eijsinga yang kelak menjadi sahabat Raja Ali Haji. Di sini ia bertemu juga dengan Gubemur Jendral Godart Alexander Gerald Phillip Baron Van der Caplen dan berkenalan dengan kehidupan orang Belanda serta menyaksikan berbagai bentuk pertunjukan kesenian. Disamping itu, beliau juga pernah menyertai ayahnya dalam perjalanan dagang ke pantai utara pulau Jawa.¹⁷

Setelah beberapa lama pulang ke Riau, Raja Ahmad kembali. Untuk kedua kalinya ke Batavia (1823), tetapi kali ini tanpa anaknya. Di Batavia ia jatuh sakit dan segera pulang ke Riau dan bernazar seandainya ia sembuh ia akan pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.¹⁸ Pada tahun 1828M, Raja Ali Haji bersama ayahnya menunaikan ibadah Haji ke Mekkah. Perjalanan menunaikan ibadah haji ini, direkam dengan baik oleh Raja Ali Haji dalam *Tuhfat al-Nafis*. Di kota Mekkah inilah Raja Ahmad membeli rumah dan kebun yang kemudian diwakafkan, ini dimaksudkannya untuk mempermudah bagi orang-orang yang datang ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji, terlebih lagi bagi mereka yang bermaksud tinggal untuk beberapa waktu guna memperdalam pengetahuan agama. Selama berada di Mekkah dan Madinah lebih kurang dua tahun, Raja Ali Haji memanfaatkan waktunya untuk memperdalam ilmu bahasa terutama ilmu nahwu sharaf dan hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan agama. Demikian pula halnya dengan Raja Ahmad. Beliau dikatakan menyempatkan diri belajar

¹⁴ Muhammad Yusof Hashim, *Pensejarahan Melayu: Kajian Tentang Sejarah Melayu Nusantara* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), h.513.

¹⁵ Raja Ali Haji, *Tuhfat Al-Nafis*, h.462.

¹⁶ E. Nietscher, *De Nedderlanders in Johor En Siak*, trans. by Wan Ghalib et.al (Batavia: Bruining and Wijt, 1870), h.277.

¹⁷ Haji, *Tuhfat Al-Nafis*.

¹⁸ *Ibid*.

ilmu falak kepada Syekh Abdur Rahman dari Mesir.¹⁹

Selama perjalanannya ke tanah suci ini, ia juga bertemu dengan Syekh Ahmad Musyafilah seorang keturunan Bugis yang menjadi guru di Mekkah, serta Syekh Ismail²⁰ dan Syekh Muhammad Shalih az-Zawawi,²¹ seorang pemimpin tarekat Naqsabandiyah di Haramain. Setelah pulang dari tanah suci tahun 1830M, Raja Ali Haji dinikahkan dengan Raja Halimah, anak pamannya Yang Dipertuan Muda Raja Ja'far,²² dan ia juga mulai aktif rnengiringi ayahnya Raja Ahmad sebagai pegawai kerajaan Riau-Lingga. Sehingga bisa dikatakan bahwa pada periode ini Raja Ali Haji memasuki masa kematangannya dan ia semakin banyak terlibat dalam urusan pemerintahan dan administrasi kerajaan.

Tahun 1834M ketika Sultan Muhammad pulang dari Terengganu ke Lingga dan singgah ke Riau, Raja Ali Haji dan sepupunya Raja Ali bertindak sebagai pengawalnya ke Lingga.²³ Ini adalah awal

keterlibatan Raja Ali Haji dalam urusan pemerintahan. Tahun 1837M, perampokan menjadi masalah serius di perairan Riau, Raja Ali Haji diutus bersama saudara sepupunya tersebut untuk mengadakan inspeksi di berbagai wilayah taklukan Riau. Kepercayaan terhadap Raja Ali Haji semakin besar dan hal ini terbukti ketika tahun 1841M ia bersama saudara sepupunya juga diutus ke Lingga untuk menjadi wakil yang bertugas menjalankan pemerintahan Sultan Mahmud yang masih kecil.²⁴ Beberapa tahun kemudian, ia bersama saudara sepupunya yang lain, Raja Abdullah, disertai tugas membangun kembali pulau Kundur. Kadang-kadang Raja Ali Haji juga bertindak sebagai penengah antara pihak sultan dan pihak raja muda, seperti dalam kasus perselisihan antara Sultan Mahmud (1834-1857M) dengan Yang Dipertuan Muda Raja Abdul Rahman (1831-1844M).²⁵ Pada tahun-tahun memasuki parohan kedua abad ke-19, Raja Ali Haji menjadi semakin senior, dimana nasehatnya selalu diminta untuk mengambil berbagai kebijakan dan keputusan penting, terutama karena ia mempunyai hubungan dekat dengan dua saudara sepupunya yang menjadi Yang Dipertuan Muda, yaitu Raja Ali bin Raja Ja'far (1844-1857M) dan Raja Abdullah (1857-1858M). Bahkan nasehat-nasehatnya melampaui batas-batas teritorial kekuasaan politik. Tahun 1868M misalnya, Temenggung Abu Bakar dari Johor mengirim utusan ke Riau untuk meminta nasehat dan saran dari Raja Ali Haji mengenai keinginannya untuk memakai gelar raja.²⁶

¹⁹*Ibid.*

²⁰ Syekh Ismail adalah salah seorang pemimpin tarekat Naqsabandiyah yang pernah berkunjung ke Riau. Raja Ali (YDMR VIII) bersama semua kerabatnya menjadi murid Syekh Ismail dan mengamalkan zikir Naqsabandiyah. Adiknya Raja Abdullah (YDMR IX) belakangan menjadi khalifah Syekh Ismail. Namun belum didapati keterangan yang pasti mengenai keikutsertaan lapisan sosial yang lain. Sebab itu tidak menjadi titik perhatian Raja Ali Haji dalam *Tuhfat al-Nafis*. Tampak sepertinya tarekat itu terutama sekali hanyalah merupakan kegiatan dalam lapisan atas. Raja Ali Haji, *Tuhfat Al-Nafis*, h.299-303; Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqsabandiyah Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998), h.99-101.

²¹ Beliau banyak meneruskan paham Syekh Ahmad Shirhindi. Bahkan Yang Dipertuan Muda Riau X Raja Muhammad Yusuf menjadi khalifahnyanya. Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqsabandiyah*, h.69-70.

²²Raja Ali Haji, *Tuhfat Al-Nafis*, h.304-309.

²³*Ibid.*, h.320-329

²⁴*Ibid.*, h.332

²⁵*Ibid.*, h. 330-340

²⁶Gelar yang kemudian disandang oleh Abu Bakar adalah Temenggung Seri Miharaja, Tun Abu Bakar Raja Johor. Raja Ali Haji, *Tuhfat Al-Nafis*, h. 370.

Naiknya Raja Ali ibn Raja Ja'far sebagai Yang Dipertuan Muda Riau VIII pada tahun 1844M, memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan karir beliau. Ini dikarenakan Raja Ali ibn Raja Ja'far adalah pemimpin yang memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang menyangkut persoalan agama. Misalnya terlihat dari undangannya kepada Syekh Ismail ke Riau.²⁷ Sejak saat itu, tarekat Naqsabandiyah secara resmi mulai masuk ke Riau. Kebijakan Raja Ali ibn Raja Ja'far ini juga tidak terlepas dari peranan Raja Ali Haji sebagai penasihat kerajaan,²⁸ dan atas anjurannya pula sejak saat itu Riau lebih berkembang menjadi pusat Islam kawasan Melayu abad ke-19.²⁹ Kemahiran dalam bidang hukum agama, ketatanegaraan dan tradisi Melayu, membuat Raja Ali Haji dipercayakan lagi oleh Yang Dipertuan Muda Raja Abdullah menjelang wafatnya, sebagai penanggung jawab masalah hukum di seluruh kerajaan Riau Lingga.³⁰

²⁷*Ibid.*

²⁸Banyak kebijakan Raja Ali ibn Raja Ja'far yang berkaitan langsung dengan Raja Ali Haji, seperti penyusunan kamus, hukum dan lain-lain. Dua karyanya memberikan gambaran akan hal itu, yaitu *Kitab Pengetahuan Bahasa* dan *Muqaddimah Fi Intizham*. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Barbara Watson Andaya dan Virginia Matheson, dalam *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka*, ed. by Anthony Reid, trans. by Th. Sumarthana (Jakarta: Grafiti Press, 1987), h.103.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Ketika Raja Abdullah (YDMR IX) sakit dan merasa bahwa ajalnya sudah hampir dekat, beliau menulis surat kepada Residen Riau tentang siapa—siapa saja yang pantas menduduki jabatan pada pemerintahan Riau-Lingga: “Raja Muhammad Yusuf ganti batang tubuhnya, Raja Ali Haji memegang segala pekerjaan hukum dan Raja Husin memerintahkan rayat tentara yang dibawa pergi perang itu dan Sayid Osman dan Raja Husin sepupunya memegang perkara wang dan belanja dan Haji Ibrahim Datuk Kaya Muda memeriksa menyurat dakwa-dakwa orang yang berdakwa-dakwa.” Surat

Karir beliau di kerajaan Riau-Lingga adalah sebagai penasihat dalam tiga periode Yang Dipertuan Muda, yaitu Raja Ali ibn Raja Ja'far (YDMR VIII, 1844-1857M), Raja Haji Abdullah (YDMR IX, 1857-1858M) dan Raja Muhammad Yusuf Ahmadi (YDMR X, 1857-1899M). Di samping itu, beliau juga terkenal aktif dalam kegiatan tulis-menulis³¹ dan guru dalam pelajaran bahasa Arab dan agama pada kaum kerabatnya. Barangkali jabatan paling terhormat bagi Raja Ali Haji adalah sebagai anggota *Ahl al-Hal wa al-'Aqd*. Dalam kedudukan ini, pada tahun 1857M ia melantik Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah sebagai Sultan Riau-Lingga. Dalam pelantikan ini, terlihat dalam *lafaz tauliyah* yang diucapkan beliau yaitu :

“Adalah patik semua setengah daripada Ahl al-Hal wa al-'Aqd mentauliyahkan serta melahirkan yang duli Tuanku menjadi Raja di dalam negeri Riau dan Lingga dengan segala takluk daerahnya, yang bergelar Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Serta patik semua harapkan duli Tuanku mengikuti titah Allah Ta'ala serta Rasul-Nya.”³²

ISLAM DAN MASYARAKAT MELAYU

Masuknya Islam ke dunia Melayu,³³ khususnya di kepulauan Melayu (Asia

tersebut diterima Residen Belanda kemudian diberi tanda pengesahan. Mengenai peristiwa ini, lihat Raja Ali Haji, *Tuhfab Al-Nafis*, h.358.

³¹ Hasan Junus, *Raja Ali Haji*, h. 54.

³²Raja Ali Haji, *Tuhfab Al-Nafis*, h.355.

³³“Dunia Melayu” merupakan suatu wilayah dan entitas budaya yang ditandai dengan berbagai ciri khas “kemelayuan yang menyebar dari Malagasi di pantai utara benua Afrika di sebelah Barat sampai ke kepulauan Paskah (lautan pasifik) di sebelah timur; Dari New Zealand di sebelah selatan dan Taiwan sampai ke kepulauan Okinawa di sebelah utara. Abdul Ghafar Baba, *Tamadun Melayu* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986), h. xix.

Tenggara) melalui berbagai proses dan waktu yang cukup panjang.³⁴ Keyakinan baru ini, khususnya sejak abad ke-15, tidak hanya mentransformasikan berbagai aspek kunci nilai-nilai dan norma-norma Melayu, tetapi juga telah menjadi faktor penting dalam identitas diri Melayu. Sungguhpun demikian, peranan dan pengaruh Islam dalam kehidupan Melayu dibatasi oleh banyak kendala historis, politis, kultural dan institusional.³⁵ Syed Naquib al-Attas berpendapat bahwa Islam menandai suatu tahap yang krusial dalam modernisasi Melayu. Dikatakannya bahwa adalah Islam yang memberikan nilai-nilai universal yang baru dan positif pada Melayu. Dalam hubungan ini, orang bisa mengatakan bahwa Islam memberi isi pada definisi tentang kemelayuan dan pada nilai-nilai Melayu. Sungguhpun demikian, sejak awal penyebarannya ke wilayah ini, agama telah berhadapan dengan norma-norma, praktek-praktek dan konvensi-konvensi tradisional yang sudah sangat meresap dalam kebudayaan Melayu yang dikenal dan dianggap sebagai adat. Dalam banyak hal, hubungan antara adat dan Islam bersifat dialektis yang terus-menerus mencirikan dua kekuatan yang saling berhubungan satu sama

lain. Hasilnya adalah suatu jenis doktrin Islam bastar (cangkakan) yang beraneka ragam, yang terdiri dari campuran pekat antara praktek-praktek Islam maupun non-Islam yang telah diserap oleh kaum Melayu.

Sebelum Islam datang ke Asia Tenggara, kaum Melayu adalah penganut animisme dan dinamisme yang menjelaskan luasnya praktek-praktek kepercayaan kuno berbasis Hindu dalam kebudayaan dan bahasa Melayu.³⁶ Dalam banyak kasus praktek-praktek sihir, tahayul, roh, tabu, menggunakan pengaruh pawang dan bomo atau dukun, serta hubungannya dengan makhluk ghaib seperti jin, setan, tuyul ataupun orang bunian masih mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu.³⁷

Di samping itu, pengaruh adat perpatih dan temenggung juga telah berakar dalam kehidupan masyarakat Melayu. Meskipun terdapat perbedaan antara kedua adat ini, yang pertama bersifat matrilinear dan yang kedua bersifat patrilinear, keduanya berasal dari puncak yang sama.³⁸ Adat

³⁶ Syed Naquib al-Attas, *Islam Dalam Sejarah Kebudayaan Melayu* (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1972), h.15.

³⁷ Banyak kata-kata Melayu yang berasal dari tradisi Hindu, seperti denda, neraka, perdana menteri, sastra, surga, guru, raja, maha ataupun duta. Lihat Hussin Mutalib, *Islam dan Etnisitas*, h.19.

³⁸ Di dalam terombo (tambo Minangkabau) dan sejarah lisan tentang asal-usul adat, adat Perpatih dan adat Temenggung di daerah Melayu disebutkan berasal dari dua tokoh yang bersaudara seibu dan berlainan bapak. Kedua tokoh ini dilukiskan sama dengan yang disebutkan dalam tambo adat Minangkabau tentang asal-usul Adat Ketemenggungan dan Adat Perpatih Nan Sabatang yang meletakkan dua aliran (laras) adat Minangkabau, yaitu adat Koto Pialang dan adat Bodi Chaniago. Dengan demikian, di daerah Melayu nama tokoh peletak dua aliran, adat di Minangkabau langsung dijadikan nama aliran adat yang terdapat di daerah. Lihat Amir Luthfi, *Hukum Dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam Di Kesultanan Melayu Siak 1901-1942* (Pekanbaru: Susqa Press, 1991), h.122.

³⁴ Banyak teori maupun hipotesa yang mengungkap tentang kapan dan dari mana Islam pertama menyebar di wilayah ini. Kebanyakan berargumentasi pada abad ketujuh atau ketlga belas. Sumber-sumber spekulasi mereka menyangkut tentang cara dan situasi dimana islamisasi "Melayu" terjadi. Mengenai asal-usul penyebaran, perdebatan akademis berpusat di Arabia dan India. Di dalam wilayah Melayu sendiri, peranan kota-kota pantai seperti Pasai, Malaka dan Aceh telah diakui secara luas dan telah banyak didokumentasikan. Untuk lebih jelasnya, lihat Syed Naquib al-Attas, *Preliminary Statement On A General Theory of the Islamisation of the Malay Indonesia Archipelago* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1969); Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVI Dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1995).

³⁵ Husin Mutalib, *Islam dan Etnisitas*, h.15.

perpatih mempunyai suatu bahan rujukan dalam bentuk dokumen yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan adat ini. Dokumen ini disebut dengan Undang-Undang Minangkabau, Undang-Undang Adat dan Undang-Undang Luhak Tiga Laras.³⁹ Berbeda dengan adat perpatih, adat temenggung banyak dianut di daerah Melayu karena memiliki unsur kekerabatan patrilinearis (garis keturunan pihak laki-laki) yang kuat dan ini sering dijadikan alat legitimasi bagi penguasa. Dalam perkembangannya, adat ini masuk ke dunia Melayu bukan melalui imigran Minangkabau, akan tetapi melalui proses akulturasi budaya dari Palembang yang sudah mulai meninggalkan sistem kesukuarnya. Meskipun banyak dianut di daerah Melayu, adat temenggung tidak mempunyai suatu dokumen khusus yang dapat dijadikan rujukan tentang asal-usul, isis, dan prinsip adat maupun ketentuan pokok aturan yang berlaku di dalamnya. Dokumen resmi yang memuat aturan-aturan adat temenggung yang disebut undang-undang, seperti Undang-Undang Malaka, hanya memberi informasi tentang sifat atau ciri-ciri dari adat tersebut, bukan berupa kodifikasi adat itu sendiri. Ajaran adat maupun prinsip hukum yang terdapat dalam adat temenggung harus dicari di dalam undang-undang Melayu lama tersebut. Hanya hal-hal yang mengenai adat kebiasaan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kelahiran, perkawinan, penobatan dan pemakaman raja-raja Melayu dapat dijumpai dalam satu dokumen yang dikenal dengan adat Raja-Raja Melayu.⁴⁰

Di daerah pesisir timur Sumatera maupun di kepulauan riau, sebenarnya sistem pembagian adat Melayu menjadi dua

ini, tidak begitu dikenal. Biasanya masyarakat yang berada di daerah ini hanya menyebut adat yang diadopsinya sebagai adat Melayu saja, sebagai imbingan dari adat Minangkabau.⁴¹ Sungguhpun demikian, adat Melayu yang berkembang adalah adat temenggung. Adat temenggung dalam perkembangan tradisi masyarakat Melayu telah mengalami pembauran budaya akibat terjalannya kontak dagang, serta memiliki pengkayaan nilai-nilai kepercayaan serta unsur-unsur mitologis, sosio-kultural-politis, historis maupun geografis. Ini terlihat dalam karya Raja Ali Haji *Tuhfat al-Nafis* dan *Silsilah Melayu Bugis* yang menggabungkan tiga unsur besar tradisi, yaitu: tradisi Melayu Melaka, tradisi Melayu-Bugis dan Tradisi Persia. Ramuan dan ketiga unsur tradisi inilah yang tampak dalam karya beliau. Ciri khas dari tradisi melayu ini adalah kuatnya pengaruh yang menggambarkan watak kepemimpinan patriarkal feodalistis.

Walaupun berada dalam latar belakang feodal tersebut, kaum Melayu tetap menganut norma-norma adat ini, sementara pada saat yang sama juga mengakui sifat komplementaritasnya dengan prinsip Islam. Simbol-simbol wewenang dan legitimasi Melayu seperti keris, pakaian kuning yang hanya dikenakan oleh keluarga kerajaan, dan tanjak Melayu (kopiah yang melambangkan kekuasaan) jelas menunjukkan komplementaritas kemelayuan dan Islam.⁴² Penghargaan orang Melayu terhadap simbol-simbol dan tradisi legitimasi ini menjadikan adat dalam kehidupan Melayu harus sesuai dengan prinsip Islam. Adanya ungkapan yang dikenal luas oleh semua orang Melayu "*biar mati anak jangan mati adat*", bermakna

³⁹*Ibid.*

⁴⁰ Panuti H.M. Sudjiman, *Adat Raja-Raja Melayu* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1982), h.187-210.

⁴¹ Abdullah Siddik, *Pengantar Undang-Undang Adat Di Malaysia* (Kuala Lumpur: University Malaya, 1975), h. 159.

⁴² al-Attas, *Islam Dalam Sejarah Kebudayaan Melayu*.

prinsip-prinsip adat harus dijalankan dan ditegakkan kepada siapapun. Seandainya anak sendiri yang bersalah, maka kesalahan tersebut karena memang bertentangan dengan adat. Ini kemudian diperkuat lagi dengan pepatah Melayu, “*Adat bersendi syara, syara’ bersendi Kitabullah*”.

PEMIKIRAN ETIKA RELIGIUS RAJA ALI HAJI

Pemikiran etika yang dikembangkan oleh Raja Ali Haji sangat berhubungan erat dengan nilai dasar ajaran Islam, yaitu al-Qur’an, Sunnah, pemikiran teologi Islam dalam realitas sejarah serta tradisi Melayu yang menghiasi setiap episode kehidupan Melayu, sebagaimana dibawah ini.

A. Moralitas Penguasa

Dalam *Tasamarat al-Muhimmah* dan *Muqaddimah fi Intizham*, Raja Ali Haji berpandangan bahwa fungsi negara dan kewajiban utama masyarakat adalah menciptakan iklim yang mendorong pelaksanaan agama secara wajar, sehingga setiap individu dapat melaksanakan tugas spritualnya dan mempersiapkan dirinya untuk hari akhir. Inilah sebabnya Tuhan mengangkat penguasa yang harus memberi teladan tingkah laku yang terpuji. Para penguasa mempunyai tanggung jawab khusus dalam mempertahankan agama, karena mereka di atas segalanya, telah dianugerahi Tuhan pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakannya. Mampu membedakan yang baik dan buruk, dan karenanya mereka memiliki kekuasaan politik yang dapat meletakkan aturan-aturan bagi tindak moral masyarakat.⁴³ Pandangan beliau terhadap moralitas penguasa ini,

memiliki kaitandengan posisi penguasa dalam tradisi Melayu. Sebelumnya, kedudukan penguasa mendapatkan legitimasi yang, sangat kuat. Penguasa bukan saja sebagai simbol kekerabatan komunal, tetapi juga dianggap sebagai peletak dasar peraturan dalam sistem kehidupan.

Besarnya pengaruh penguasa dalam tradisi Melayu ini hingga mereka kadangkala menganggap dirinya sebagai “dewa”. Konsep ini dilihat secara mistis dan bersifat suci yang mengandung beberapa konsep kekuasaan, yaitu daulat, durhaka dan tulah. Daulat dapat diartikan sebagai kedaulatan yang tidak hanya dalam pengertian hukum dan politik. Tetapi juga merupakan suatu pengertian budaya dan spritual. Kedaulatan dimiliki oleh seorang raja dan memberikan kepadanya sejumlah hak-hak keistimewaan selalu menempatkannya dalam posisi paling atas dalam struktur sosial masyarakatnya, serta kebal terhadap berbagai kritikan. Ini menjadi dasar bagi tuntutan loyalitas mutlak yang harus ditunjukkan oleh rakyat kepadanya.⁴⁴ Salah satu metode utama yang dipaksakan oleh penguasa-penguasa feodal Melayu untuk menjamin berlangsungnya kekuasaan dan kedudukan mereka adalah melalui tersebarnya mitos. Sebagai contoh, dalam sejarah Melayu dikatakan bahwa asal-usul raja dikaitkan secara erat dengan seorang tokoh yang dianggap sebagai keturunan Zulkarnain.⁴⁵ Demikian pula halnya dengan legitimasi dan kelangsungan kekuasaan sultan diperkuat oleh praktek pemujaan terhadap kekuatan-kekuatan magisnya, bahkan kadangkala terhadap daulat atau sifat kedewaannya dan ancaman pembalasannya.

Memberontak terhadap raja berarti pengingkaran terhadap perintah raja dan dianggap sebagai suatu tindakan khianat

⁴³ Raja Ali Haji, *Tasamarat Al-Muhimmah* (Penyengat: Maktabah al-Riyawiyah, 1311H), p.58-59; Raja Ali Haji, *Muqaddimah Fi Intizham Wa Wazhaif Al-Mulk* (Penyengat: Maktabah al-Riyawiyah, 1311H).

⁴⁴ Hussin Mutalib, *Islam dan Etnisitas*, h.19-20.

⁴⁵Tun Seri Lanang, *Sejarah Melayu*, h.15.

(derhaka) dan merupakan dosa yang tak terampuni. Tindakan durhaka tidak hanya di hukum dalam pengertian yuridis konkrit, tetapi juga dalam arti magis-religius, yang disebut dengan istilah tulah. Dalam sejarah Melayu dilukiskan tulah yang menimpa raja Cina yang tidak mau mengakui daulat Sultan Mansur Syah. Ia ditimpa penyakit dan baru bisa disembuhkan setelah mengakui daulat Sultan Melaka itu dengan jalan meminum dan membasuh muka dengan air bekas cuci kaki sang Sultan.⁴⁶ Sang Rajuna Tapa, bendahara Raja Iskandar Syah di Singapura, mendapat tulah karena khianat kepada raja. Rumahnya roboh dan ia sendiri bersama istrinya menjadi batu.⁴⁷

Studi yang dilakukan oleh Chandrasekar Pilay (Chandra Muzaffar) yang dikutip kembali oleh Husin Mutalib mengenai nilai-nilai tradisional masyarakat Melayu menyimpulkan bahwa; kendatipun kelas-kelas penguasa mempunyai beberapa gagasan mengenai keadilan, tujuannya selalu untuk mempertahankan kekuasaannya *vis a vis* dihadapan kekuasaan lain. Jika ada kekuasaan lain yang cukup penting untuk mengimbangi kesewenang-wenangan rezim, maka itu adalah Islam. Walaupun demikian, keberhasilannya terbatas karena kuatnya sentimen-sentimen feodal dan tindakan-tindakan refresif terhadap rakyat yang memilih mengabaikan hukum. Peranan Islam di sini mengambil bentuk pembangkangan melalui kritik yang ditujukan kepada dekadensi kelas penguasa dan kecenderungannya untuk menindas — terbukti misalnya, dalam kritik Abdullah Munshi terhadap kesewenang-wenangan kerajaan dan kepemimpinan feodal

Melayu.⁴⁸ Kedudukan penguasa dalam struktur tradisi Melayu memang sangat kuat.

Apabila dilihat dalam literatur kenegaraan Melayu tradisional dan dihubungkan dengan pendekatan teori kenegaraan, maka tradisi kenegaraan Melayu lebih dekat kepada teori *Mirrors for Princess* (cermin para raja),⁴⁹ yang menekankan peran sentral raja dan ketergantungan rakyat pada anugerahnya. Ide-ide yang mendukung dari proses islamisasi kerajaan-kerajaan Melayu, dimana pengaruh Persia mulai mendominasi sistem pemerintahan Melayu, misalnya memakai gelar Syah atau *Zilullah fi al-Alam* (bayangan Tuhan di bumi). Dalam *Muqaddimah fi Inthibaham*, Raja Ali Haji memberikan pegangan, apa maksud dan tujuan kerajaan itu didirikan:

“Bermula maksud kerajaan yang dikehendaki Allah SWT itu yaitu dua jalan. Pertama-tama karena memelihara segala hamba Allah daripada jatuh menganiaya setengah atas setengahnya daripada pertimbangan kesalahan dan

⁴⁸ Abdullah bin Abdul Kadir Munshi, *Hikayat Abdullah*, h. 305.

⁴⁹ Teori *Mirror for Princes* ini sebenarnya dikenal di Eropa. Sedangkan Malcom H. Kerr menyebutnya sebagai mazhab sektorial-administratif (*secretarial-administrative school*), Teori ini lebih menekankan tentang etika pelaksanaan kekuasaan tanpa mempersoalkan apa dan bagaimana bentuk kekuasaan itu. Yang terpenting adalah ketertiban jalannya administrasi pemerintahan dan keadilan yang dimajukan oleh penguasa. Ide dalam teori ini diambil dari tradisi Persia yang ditemukan di dalam Sasaniah yang berimkan hak suci raja dan ketergantungan rakyat kepada kebaikan raja. Tradisi kerajaan Sasaniah ini kemudian dipadukan dengan ajaran Islam dan dari situ lahirlah teori pujangga mengenai negara (*literary theory*). Malcom H. Kerr, *Islamic Reform: The Political and Legal Theory of Muhammad Abdub and Rashid Rida* (London: Cambridge University Press, 1966), h.53.

⁴⁶*Ibid*, h.97.

⁴⁷*Ibid*, h.53.

kebenaran segala hamba Allah dan segala rakyat yang di bawah hukumannya dengan syari 'at Rasulullah SAW. Kedua karena jasa dan balas yang amat besar di dalam akhirat dengan dipuaskan di dalam surga dengan beberapa isri daripada hurul 'ain dengan beberapa kesukaan dan permainan yang tiada pernah dilibat oleh mata dan tiada pernah didengar oleh telinga.”⁵⁰

Dalam *Tsamarat al-Muhimmah*, Raja Ali Haji menjelaskan tentang pengertian raja yang dapat disinonimkan dengan khalifah, imam dan sultan. Kesemua kata-kata ini memiliki arti yang sama, perbedaannya hanya pada konotasinya saja. Raja Ali Haji mengatakan:

"Bermula makna raja itu jika dikata raja itu dengan makna khalifah, yaitu khalifah Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam pada mendirikan Islam dan menghukumkan akan segala hamba Allah dengan hukuman al-Qur'an dan Hadits dan ijma'. Jika dikata raja itu dengan makna sultan maka yaitu mengeraskan hukuman atas segala rakyatnya dengan hukuman yang adil yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan jika dikata raja itu dengan makna imam maka itu ikutkan segala rakyatnya pada segala hukuman dan perintahnya dan

tiada membawa kepada kufur dan ma'siat.”⁵¹

Mengenai mitos maupun kedudukan raja yang dianggap sakral, sebagaimana yang tampak dalam literatur tradisional Melayu, yang sering mengidentifikasikan raja dengan Tuhan atau bayang-bayang Tuhan di muka bumi yang kebal terhadap kritikan, mendapat sorotan tajam dari Raja Ali Haji. Beliau berpandangan bahwa hal yang demikian itu bisa membawa kepada kekufuran serta mengantarkan kepada absolutisme kekuasaan. Raja Ali Haji berusaha mengeluarkan pemahaman paradoksial masyarakat Melayu terhadap pemimpinnya, ke arah yang lebih sejalan dengan ketentuan syari'ah. Raja Ali Haji mengatakan:

"...dan belum aku dapat makna raja itu dengan berbuat sebarang kebendaknya seperti ku dapat istilah setengah negeri mentasbibkan yakni mengumpamakan raja mereka itu dengan makna berbuat barang sekebendaknya terkadang tergelincir lidah mereka itu dengan diumpamakannya dengan Allah Subhanahu wa T a 'ala dengan katamereka itu raja itu fa 'alul lima yurid atau fa 'alul lima sya ' yakni berbuat barang sekebendaknya maka tasybih ini tiada syak kepada haramnya baik tak baik membawa kepada kafir. Na'uzubillahi minha”⁵²

Dalam masalah hukum mengadakan imamah, Raja Ali Haji sependapat dengan pendirian mayoritas umat, dengan

⁵⁰ Raja Ali Haji, *Muqaddimah Fi Intizham Wa Wazhaif Al-Mulk*, h.1-2.

⁵¹ Raja Ali Haji, *Tsamarat Al-Muhimmah*, h.9.

⁵² *Ibid.*, h. 9-10

mengatakan bahwa: “*Bermula mendirikan raja itu pada ugama Islam fardhu kifayah*”. Hanya saja, Raja Ali Haji tidak memberikan argumentasi yang dapat menjelaskan pendapatnya ini, apakah dengan mengutip ayat al-Qur’an atau argumentasi rasional lainnya. Barangkali Raja Ali Haji melihat bahwa persoalan imamah berhubungan erat dengan suatu kenyataan sosiologis untuk terlaksananya fungsi-fungsi syari’at. Mengenai cara pengangkatan seorang penguasa, Raja Ali Haji sejalan dengan pandangan *ahl Sunnah wa al-Jama’ah*, yaitu ada tiga cara penentuan seorang pemimpin: pertama, seorang penguasa diangkat melalui pemilihan secara tidak langsung, yaitu melalui lembaga perwakilan yang disebut dengan *ahl-al-Haq wa al-’Adl*. Dalam tulisan Raja Ali Haji, badan ini merupakan suatu lembaga musyawarah yang terdiri dari para ulama, orang laki-laki yang bertakwa dan baik-baik dan kepala-kepala yang layak-layak.⁵³ Apabila dilihat dalam realitas sejarah yang ditunjukkan oleh Raja Ali Haji ketika pengangkatan Raja Ali ibn Raja Ja’far sebagai Yang Dipertuan Muda, jelas lembaga tersebut hanya diwakili oleh kerabat istana saja. Hal demikian wajar, karena dalam masyarakat feodal rakyat tidak memiliki partisipasi yang berani dalam masalah politik. Kedua, melalui *isitikeblaf* (penunjukan) dari raja yang sedang berkuasa. Di sini, Raja Ali Haji juga menegaskan bahwa pengganti dari penguasa yang ditunjuk tersebut harus mendapatkan persetujuan *ahl al-Hal wa al-’Adl*, yang mendahulukan musyawarah mufakat. Ketiga, melalui kekerasan atau juga kudeta. Akan tetapi Raja Ali Haji tidak memberikan pendalaman teoritis mengenai hal ini.⁵⁴

Dalam *Tsamarat al-Mubimmah*, Raja Ali Haji tetap menggunakan konsep idealnya

raja dalam politik praktis. Beliau menjelaskan sekitar tiga belas sifat raja yang buruk yang dapat menurunkan wibawa pemerintahan. Ini bisa dilihat dari sikapnya yang congkak, hati, serakah, menghambur-hamburkan uang, tidak acuh terhadap soal administrasi dan masyarakat, penipu, suka bersenda gurau, serta bersikap menghambat tradisi.⁵⁵ Semasa pemerintahannya tiada biaya untuk menghimpun para ahli-ahli agama, sekolah-sekolah tidak didirikan dan pendidikan terabaikan. Rakyatnya bodoh, tidak tahu, sopan santun, amoral, dalam kondisi yang demikian banyak terjadi pencurian, perampokan, dan perompakan. Sebaliknya, Raja yang baik, menurutnya, pantang melakukan hal-hal duniawi yang merusak, seperti minum-minuman arak, berjudi ataupun menyabung ayam. Ia bersikap hidup sederhana, adil dan amanah, serta mencurahkan perhatiannya pada pembangunan mesjid, pendidikan, asrama, bagi musafir atau penuntut ilmu, membangun sarana dan prasarana perkotaan bagi rakyat, serta mendirikan kantor polisi. Jika kedengkian, keserakahan dan iri hati mengancam keharmonisan kerajaan, raja yang saleh menentramkan keadaan dan dengan cepat mengadakan penyelidikan atas isu-isu tersebut serta melaksanakan hukum untuk mencegah terjadinya pertentangan. Kesejahteraan mencerminkan sifat-sifat raja, karena hanya rajalah yang memiliki kekuasaan untuk menciptakan negara spritual yang didambakan dan bisa memberikan kesejahteraan materiil. Di bawah pemerintahan raja yang baik, negara pun menjadi sejahtera.

Raja Ali Haji dalam *Tuhfat al-Nafis* mengembangkan argumentasi tersebut bagi masyarakat Melayu dengan ilustrasi-ilustrasi yang diambil dari sejarah mereka sendiri. Dalam uraian mengenai abad ke-18, Raja Ali

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

Haji menunjukkan kebesaran kerajaan Riau-Johor-Lingga yang pernah mencapai kondisi sejahtera dan damai seperti idealnya suatu kerajaan. Dalam teks tersebut jelas raja ideal yang dimaksud. Di bawah pimpinan pangeran-pangeran Riaudohor-Lingga terkenal, seperti Daeng Kamboja dan Raja Haji, pemerintahan dijalankan menuntun aturan syari'at dan agama Islam pun berkembang. Kekayaan datang melimpah di negara seperti itu; pelabuhan Riau penuh dengan kapal-kapal dari Benggala, Cina, Sri Lanka, maupun dari Thailand dan penduduknya sejahtera.

Raja Ali Haji percaya bahwa raja-raja memberikan keteladanan perilaku. Beliau mencontohkan dengan Sultan Abdul Rahman, Sultan Riau ke-5 (1823-1832). Semasa pemerintahannya, beliau banyak mencurahkan perhatian pada bidang sosial-keagamaan, seperti mengembangkan tarekat serta menganjurkan penelitian-penelitian di bidang sosial-keagamaan serta pendidikan. Sultan Abdul Rahman sendiri dikatakan sering berpakaian cara Arab dan sering berdiskusi tentang persoalan agama dan kemasyarakatan dengan para Sayid dan pembesar kerajaan. Beliau juga dikatakan sering memimpin sendiri pejabat pemerintahannya shalat Jum'at. Demikian juga halnya dengan YDM Riau ke-6, Raja Ja'far (1805-1831) yang sama menyadari kewajibannya terhadap masyarakat, mensponsori penelitian-penelitian agama, pendidikan bagi masyarakat, serta sering meminta nasehat dari orang-orang tua dalam masalah pemerintahan dan kemasyarakatan. Ia menggemari membaca al-Qur'an dan mendengarkan tindakan raja-raja di masa lalu. Ia juga menaruh perhatian terhadap hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang agama. YDM Riau ke-8, Raja Ali (1845-1857) adalah murid yang rajin menuntut ilmu dalam bidang pengkajian agama, beliau melarang tradisi yang bertentangan dengan aturan

Islam, seperti berjudi dan kebebasan bertingkah laku antara pria dan wanita.⁵⁶ Raja-raja seperti itu untuk mengembalikan dan mengabadikan masyarakat yang lebih agung, lebih bersih seperti pernah ada di masa lalu.

Meskipun dalam banyak hal Raja Ali Haji menekankan pentingnya kepatuhan kepada raja, namun ia juga menjelaskan bahwa dasar dari kepatuhan itu haruslah kesetiaan kepada syari'at dan perhatian yang secara sungguh-sungguh bagi kemashlahatan kaum muslimin. Raja Ali Haji berpandangan bahwa apabila seorang raja membuat kebijaksanaan dan undang-undang yang menyimpang dari syari'at dan adat-istiadat Melayu serta tidak mampu melaksanakan kepentingan dan kemashlahatan umat, maka raja tersebut dimakzulkan.⁵⁷ Di sini kelihatan bahwa Raja Ali Haji memahami raja secara terpisah dari konsep abstrak tentang kerajaan. Karena loyalitas bukanlah diberikan kepada diri raja, akan tetapi kepada suatu gagasan yang dibentuk oleh syari'at.

B. Ketaatan pada Syari'at

Salah satu etika Melayu yang dipaparkan Raja Ali Haji adalah kepatuhan dinamis terhadap syari'at. Dengan memandangnya sebagai entitas yang mempengaruhi perjalanan seorang manusia dan tradisi Melayu, syari'at bisa dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari etika komunal masyarakat Melayu. Syari'at merupakan perwujudan dari nilai-nilai Islam yang nampak dan memiliki kekuatan yang mengikat dalam diri pribadi manusia dan tradisi Melayu. Dalam hubungan ini, definisi tentang "*kemelayuan*" tidak akan lengkap tanpa adanya simbol Islam atau syari'at

⁵⁶Raja Ali Haji, *Tuhfab Al-Nafis*, h.346-348.

⁵⁷Raja Ali Haji, *Tsamarat Al-Mubimmah*, h.55-

Islam.⁵⁸ Dalam pepatah Melayu dikatakan: “Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah”, dan “Adat bersendi hukum, hukum bersendi Kitabullah, kuat adat tak gaduh hukum, kuat hukum tak gaduh adat”. Pada bagian lain dikatakan pula: “Melayu itu Islam dan Islam itu Melayu”. Sehingga bisa dikatakan bahwa menyalahi adat, berarti menyalahi syari'at yang telah ditetapkan. Raja Ali Haji berusaha menjelaskan tentang akibat yang ditimbulkan apabila manusia Melayu mulai mencoba meninggalkan tradisi yang telah ada. Beliau mengatakan bahwa kelemahan manusia dan pembangkangan terhadap syari'at merupakan penyebab segala konflik dan bencana yang menghinggapinya masyarakat. Salah satu contoh konkrit yang diberikan beliau adalah adanya fitnah, kesombongan dan bantahan.

Dalam *Kitab Pengetahuan Bahasa*, beliau berusaha menjelaskannya dari perspektif teologis dengan ilustrasi-ilustrasi yang diambil dari sejarah kehidupan masyarakat Melayu sendiri. Bahwa sikap acuh tak acuh terhadap Allah mulai manakala Allah memerintahkan malaikat untuk tunduk kepada Adam, hanya satu yang menolak yakni iblis. Kesombongan ini menyebabkan iblis tidak disukai dan dibuang dari surga dan menjadi kafir. Ia membawa serta bersamanya Adam dan Hawa.⁵⁹ Seperti halnya keharnnonisan surga rusak oleh iblis, stabilitas Riau pun terganggu oleh kegagalan manusia mentaati ajaram Nabi dan ketidak mampuannya mengatasi kelemahan diri pribadi. Kekuatan-kekuatan perusak dalam kerajaan bergerak bukan karena takdir, melainkan karena hasil dari keinginan manusia untuk mengikuti segala hawa nafsunya. Yang paling rnerusak adalah

bantahan dan fitnah sorta kesombongan untuk membesarkan diri seperti halnya iblis.⁶⁰

Dalam *Kitab Pengetahuan Bahasa*, Raja Ali Haji menekankan bahwa satu-satunya jalan unruk mengatasi hawa nafsu dan meletusnya konflik dalam masyarakat adalah ketaatan pada ajaran-ajaran syari'at, serta pemahaman dan pendalaman al-Qur'an pada guru yang ahli. Menurut beliau, prilaku yang benar adalah prilaku yang didasarkan kepada perintah ajaran Islam. Dengan bimbingan agama, sifat tersebut yang menjadikan manusia lebih tinggi derajatnya dari makhluk lain di dunia mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga malu (rendah hati), ilmu (pengetahuan) dan akal (nalar) dapat dipelihara. Dengan memiliki pengetahuan dan rendah hati, manusia tak akan sombong atau mengagungkan dirinya sendiri. Sebaliknya, hal tersebut justru akan menambah keinginan untuk mendalami kebenaran ajaran Allah dan hari akhirat.⁶¹ Masyarakat akan beroleh kedamaian jika mereka masing-masing berusaha menjaga malu (rendah hati), ilmu dan akal. Meskipun demikian, sifat tersebut senantiasa terancam oleh ketidaktahuan manusia, karenanya usaha keagamaan tidak boleh berhenti, harus terus menerus diusahakan. Mengikuti hawa nafsu adalah penyakit yang terparah yang menyedihkan, manusia dapat menyamai malaikat dengan memumikan keinginannya, tetapi dapat juga tenggelam setingkat dengan hewan bila mengikuti hawa nafsunya.⁶²

Dalam sejarah Riau-Johor-Lingga, Raja Ali Haji menunjukkan konsekuensi logis yang diperoleh karena tidak mau mentaati syari'at serta tidak dapat mengekang hawa nafsu yang diumpamakannya dengan api dalam diri

⁵⁸ Syed Naquib al-Attas, *Islam Dalam Sejarah Kebudayaan Melayu*, h.15

⁵⁹ Raja Ali Haji, *Kitab Pengetahuan Bahasa*, h. 192-193 dan 243-244.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 268

⁶¹ *Ibid.*, h. 170

⁶² *Ibid.*

manusia. Semakin lama semakin menyala, semakin sulit dipadamkan, sehingga membesar menjadi kobaran kemarahan dan membahayakan eksistensi kerajaan. Seperti digambarkan beliau di dalam Tuhfat al-Nafis, api kedengkian ini dimanifestasikan dalam banyak peristiwa-peristiwa fitnah (kombinasi propaganda, gosip, kejahatan dan menjelek-jelekan orang lain). Berulang kali fitnah dijadikan kambing hitam dalam konflik antara Melayu dan Bugis. Riau yang terpecah oleh karenanya, ibarat sebuah perahu dengandua kapten, atau sebuah negeri dengan dua raja. Dilakukan karena kelemahan diri manusia, fitnah dapat mendatangkan kerusakan yang tidak terduga. Namun, Riau beruntung dipimpin oleh orang-orang yang berilmu, yang menganggap perolehan ilmu dan akal sebagai karunia Allah. Lewat kebijaksanaan mereka, perdamaian dapat dikembalikan lagi dengan dilaksanakannya sumpah setia antara Bugis dan Melayu dalam rangka mengontrol bantahan dan fitnah.⁶³ Dalam kaitan ini, sumpah setia Melayu dan Bugis diucapkan:

*"Barangsiapa kiranya antara kedua pihak, sebelah. Suku-suku Melayu dan sebelah suku-suku Bugis, adalah kita menetapkan sumpah setia antara Bugis dan Melayu, seperti setia Marhum Sungai Baharu yang diperpegang hingga sampai kepada anak cucu cicitnya. Barangsiapa mungkir seperti yang telah tersebut ini, dibilasakan Allah dan dikutuk-Nya tiada selamat dunia akhirat."*⁶⁴

Pengulangan sumpah pada waktu-waktu krisis meluruskan jalannya sejarah

dengan menahan hawa nafsu dan meletakkan kembali keadaan yang seimbang di negeri tersebut. Raja Ali Haji juga menjelaskan bahwa sebenarnya dimensi kepatuhan pada syari'at masyarakat Melayu dapat dilihat dari implikasi moralnya bagi ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.⁶⁵ Dengan demikian, segala pertentangan antar etnis seperti Melayu dan Bugis yang digambarkan di atas, dengan sendirinya menjadi redam oleh karena supremasi Islam.

C. Bahasa

Raja Ali Haji menganggap bahwa perhatian yang sungguh-sungguh terhadap bahasa adalah penting guna memperoleh ucapan yang tepat, ungkapan yang halus dan implikasinya terhadap adab pergaulan.⁶⁶ Beliau percaya bahwa memperdalam keahlian linguistik sebagai salah satu ilmu tambahan, adalah cara untuk menambah ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah.⁶⁷ Tentunya pandangan ini berlaku bagi bahasa Arab, sarana terpilih bagi pesan-pesan Al-Qur'an, tetapi dalam tulisannya sendiri Raja Ali menekankan bahwa sedapat mungkin masyarakat Melayu meniru sintaksis Arab dan mencoba menghilangkan pertumbuhan yang mulai masuk sebagai akibat dan pengaruh bahasa lain.

Dalam *Kitab Pengetahuan Bahasa* dan *Bustanul Katibin*, Raja Ali Haji berusaha menjelaskan kelas kata bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Misalnya, *fi'il* (verba), *fi'il muta'addi* (verba transitif), *fi'il lazim* (verba intransitif), *hal* (partikel), ataupun *isim mausul* (kata penghubung). Bahkan beliau juga mencoba menghubungkan dan menjelaskan tentang kelas kata dalam

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶Lihat juga komentar Abdullah Munshi dalam hal ini. Abdullah bin Abdul Kadir Munshi, *Hikayat Abdullah*, h. 315.

⁶⁷Raja Ali Haji, *Kitab Pengetahuan Bahasa*, h. 312-314.

perspektif konsep-konsep keilmuan Islam yang kadangkala tidak sesuai dengan ilmu tata bahasa, seperti *fi'il qalb*, *fi'il yakin* atau *fi'il yake*.⁶⁸ Menurut Harimukti Kridalaksana, sebenarnya Raja Ali Haji menyadari bahwa ada perbedaan antara bahasa Melayu dan bahasa Arab, yang dinyatakan bahwa dalam bahasa Melayu tak perlu lagi dicari *jar* dan *majrur*. Lagi pula perlu diingat bahwa yang dikarang oleh Raja Ali Haji adalah sebuah buku pelajara sehingga janganlah dicari suatu kearifan teoritis yang dituntut darinya. Hal ini dijelaskan Raja Ali Haji dengan membuat instruksi di setiap pasal, yang dimaksudkannya sebagai bagi orang yang ingin belajar.⁶⁹ Pentingnya kedudukan bahasa dalam pandangan Raja Ali Haji karena bahasa dapat mencerminkan etika komunal dalam suatu masyarakat. Raja Ali Haji mengatakan "*Jika hendak mengenali orang yang berbangsa, maka lihatlah kepada budi dan bahasa*".⁷⁰ Raja Ali Haji berpandangan bahwa bahasa memiliki kaitan dengan budi. Menurutnya, memperdalam ilmu bahasa bukan hanya dengan mengetahui struktur kalimatnya saja, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah mengetahui makna dan hakikat suatu bahasa sesuai dengan nilai-nilai Islam yang berlaku dalam tradisi Melayu. Apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan membentuk suatu tata ucapan bahasa yang baik dan jelas serta dapat membentuk suatu etika peradaban yang tinggi.⁷¹

Dalam *Kitab Pengetahuan Bahasa*, Raja Ali Haji banyak memberikan makna dalam bahasa Melayu dengan mengambil rujukan

dalam pengertian ilmu tasawuf, tafsir, mantiq maupun bayan, yang hasilnya adalah suatu pemahaman kata yang memiliki kedalaman dan keluasan makna yang luar biasa. Pentingnya makna dalam bahasa, juga dicontohkan oleh Ungku Aziz pada kata "*sabar*". Apabila kata itu dijelaskan secara sederhana, yaitu pada sisi lahirnya saja yang tidak merujuk kepada nilai dasar tradisi Melayu Islam, maknanya menjadi pasif. Akan tetapi bila kata "*saba*" dikaitkan dengan nilai dasar tradisi Melayu Islam, justru kata ini mengandung sikap aktif, yakni dalam pengertian tekun. Ini tentunya bisa dipahami dengan baik bila menyandingkan ilmu bahasa dengan dimensi keilmuan Islam lainnya, seperti ilmu tasawuf, tafsir, mantiq, maupun bayan. Sehingga di sini jelas bahwa suatu kata apabila dijelaskan dalam perspektif yang lebih luas, akan membawa makna dan perubahan dalam suatu peradaban.⁷²

Perhatian Raja Ali Haji terhadap pentingnya bahasa Melayu ini juga tidak lepas dari kondisi lingkungannya. Dalam *Kitab pengetahuan Bahasa*, Raja Ali Haji banyak memberikan contoh-contoh dari menurunnya kesadaran masyarakat Melayu untuk menghargai bahasanya sendiri. Ia terutama menyesalkan kecenderungan masyarakat Melayu yang meniru begitu saja sintaksis bahasa Inggris dan Belanda tanpa pertimbangan nilai-nilai dasar tradisi Melayu. Seperti Kata-kata bilang yang seharusnya cakap, dan kasitahu yang seharusnya beritahu. Pengabaian bahasa, menurutnya, berarti mengabaikan tradisi yang tertanam, yang tak terelakkan akan menghancurkan susunan dunia dan kerajaan.⁷³ Perhatian Raja Ali Haji terhadap bahasa sebagai media penyampaian pesan-pesan Islam, sebenarnya

⁶⁸ Haji, *Kitab Pengetahuan Bahasa*.

⁶⁹ Harimukti Kridalaksana, 'Bustanul Katibin Dan Kitab Pengetahuan Bahasa: Sumbangan Raja Ali Haji Dalam Ilmu Bahasa Melayu' (Johor Bahru: Makalah Hari Sasatra, 1993).

⁷⁰ Raja Ali Haji, *Gurindam Dua Belas*, ed. by E. Nietscer (Batavia).

⁷¹ Haji, *Kitab Pengetahuan Bahasa*. h. 1

⁷² Hasan Junus, *Raja Ali Haji*.

⁷³ Raja Ali Haji, *Kitab Pengetahuan Bahasa*, h.173 dan 312-314.

tidak terlepas dari warisan tradisi kesusasteraan Melayu. Beliau merasakan bahwa masuknya nilai-nilai Islam turut memberikan nuansa baru bagi perkembangan kesusasteraan Melayu. Sehingga sastra Melayu yang baik, dalam pandangan Raja Ali Haji berarti sastra yang menampilkan sikap pandangan hidup tauhid, yang senantiasa melibatkan unsur-unsur pembersihan jiwa (*tazkiyah an-Nafs*) dan implikasi moralnya bagi kepentingan masyarakat.⁷⁴

Raja Ali Haji memberikan rekomendasi bahasa Arab bagi bahasa Melayu berdasarkan asumsi dasar bahwa al-Qur'an yang diturunkan secara eksplisit dalam bahasa Arab memiliki nilai universal dan partikular. Bahasa mau tidak mau bersifat budaya. Jadi, universalitas pesan al-Qur'an akan bisa terkomunikasikan kalau manusia juga memiliki dimensi universal. Dalam hal ini, rasionalitas dan substansi bahasalah yang secara jelas merupakan dimensi universal yang melekat pada manusia. Manusia dibedakan dari binatang terutama karena manusia merupakan animal symbiolicum, yaitu makhluk yang hidup dengan simbol-simbol. Berbahasa pada dasarnya adalah berpikir dan berpikir

tidaklah mungkin tanpa bahasa, meskipun berbahasa tidak selalu harus berbicara ataupun menulis.

Di sini, Raja Ali Haji mencoba menggugah kembali kesadaran kemampuan berbahasa dan rasionalitas masyarakat Melayu bahwa dengan bahasalah suatu masyarakat Melayu tercipta, komunikasi antara mereka berlangsung, dan dunia sekitarnya menjadi bermaknanya. Barangkali fenomena itulah yang diisyaratkan di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 31:

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman: Sebutkanlah kepadaKu nama-nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar”

Karena rasionalitas dan simbol yang dimiliki manusia maka realitas masa lampau bisa direkonstruksi, diceritakan dan dihadirkan kembali melalui narasi sejarah. Suatu nilai, gagasan dan cita-cita masa lampau pun bisa diwariskan kepada generasi ke generasi lantaran adanya sistem simbol ini. Dan sesungguhnya hanyalah al-Qur'an yang secara eksplisit dan tegas mengatakan agar umat Islam mengembangkan rasionalitas dan sistem simbol untuk membangun peradabannya. Kita bisa membuat suatu pengandaian, kalau saja al-Quran bertentangan dengan rasionalitas, maka bisa dipastikan bahwa Islam telah didistorsi dalam perjalanan sejarahnya, Lebih dari itu etika Islam akan teranomali dalam kehidupan modern. Rekomendasi yang diberikan Raja Ali Haji pada bahasa Arab agar dijadikan rujukan standar bahasa Melayu, dengan demikian juga memiliki sandaran teologis dan nilai pragmatis, yakni agar masyarakat Melayu dalam memahami

⁷⁴Sastra sebagai media penyampaian misi atau cerita masyarakat Melayu, dapat dilihat dari perkembangan awal sastra Melayu, yaitu sastra lisan dan sastra tulisan. Sastra lisan dalam bentuknya yang paling awal bermula dari asal-mula tradisi Melayu, yaitu dari Bukit Siguntang dan seterusnya. Unsur-unsur mitologis sangat dominan di dalamnya. Sedangkan sastramlisan bermula sekitar abad ke-7, berdasarkan temuan para ahli tentang tulisan yang berasal dari huruf pallawa pada batu di Kedukan Bukit (683 M). Kemudian disusul dengan pengaruh Hindu-Budha, serta Melayu Melaka Islam, yang menampilkan wujudnya dalam bentuk syair, hikayat dan lain-lain. Lihat C. Hooykaas, *Perintis Sastra* (Jakarta: ttp, 1951); Sulastin Sutrisno, *Hang Tuah: Analisa Struktur Dan Fungsi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983).

bahasanya tetap berjalan dalam kerangka nilai-nilai Islam, karena memahami bahasa al-Qur'an juga harus memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab. Dengan demikian, bahasa Arab memiliki nilai tata bahasa yang tinggi, sehingga menjadi sarana terpilih bagi penyampaian pesan-pesan Allah. Oleh karena itu, transformasi struktur bahasa Arab dan simbol-simbol dalam al-Qur'an yang berbahasa Arab sangat berguna bagi pengkayaan sistem simbol dan struktur bahasa Melayu.⁷⁵

D. Lingkungan Bermoral

Melihat dari unsur-unsur pembentuk etika masyarakat Melayu, sebagaimana dinyatakan diatas, Raja Ali Haji sebenarnya bermaksud mengklasifikasikan persoalan moral ini ke dalam tiga bagian pokok yang tak tarpisahkan, yaitu individu, masyarakat dan peran negara. Ketiganya memiliki kewajiban masing-masing dalam pembentukan lingkungan bermoral, namun dalam pelaksanaannya, ketiganya harus seiring-sejalan.⁷⁶ Kerangka ideal yang diberikan beliau bahwa fungsi negara dan kewajiban utama masyarakat adalah menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan syari'at, sehingga setiap individu dapat melaksanakan kewajiban moral dan sprituilnya secara wajar. Dalam *Kitab Pengetahuan Bahasa*, Raja Ali Haji menjelaskan secara praktis tentang aturan-aturan ataupun kewajiban-kewajiban yang selayaknya dilakukan oleh orang Melayu, yang

diistilahkan beliau dengan adab. Beliau membagi adab menjadi lima: yaitu adab kepada Allah, adab kepada orang tua, adab kepada ahli-ahli (keluarga), adab kepada sanak saudara dan adab kepada orang 'am yang tidak dikenal (orang lain/asing).⁷⁷ Adapun pengertian masing-masingnya sebagai berikut:

Pertama, adab kepada Allah dimulai dengan merendahkan diri (sikap *tawadhu'*) dan mendiamkan seluruh anggota tubuh dan segala pikiran yang dapat memalingkan dirinya dari mengingat yang lain selain Allah swt. Diantara cara yang dianjurkan beliau adalah melalui zikir. Raja Ali Haji juga menekankan tentang nilai ikhlas. Nilai keikhlasan merupakan simpul keagamaan (religiusitas) pribadi, yang tidak lain adalah wujud nyata dari kepasrahan total kepada Allah.⁷⁸ Beliau menghubungkan sikap kepasrahan (berserah diri) ini dengan kewajiban yang berimplikasi moral lainnya, seperti mentaati segala peraturan yang telah ditentukan di dalam syari'at, yaitu shalat, puasa, zakat, haji, membayar nazar dan lain-lain. Dalam kaitan ini, Raja Ali Haji mengatakan:

"Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Barangsiapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua temasa. Barangsiapa meninggalkan zakat, taidalah hartanya beroleh berkat. Barangsiapa meninggalkan haji,

⁷⁵Salah satu sistem simbol yang bisa dilihat adalah melengkapi skrip bahasa Melayu dengan penggunaan huruf Arab. Ibnu Barutah menyebutnya "huruf Jawi" (tulisan Arab-Melayu). Lihat Ismail Hamid, 'Proses Penulisan Sastra Islam Dalam Bahasa Melayu', *Jurnal Persatuan Melayu*, 1 (1995); Siddik Fadhl, *Membangun Manusia Melayu Muslim* (Jakarta: CIDES, 1993).

⁷⁶Raja Ali Haji, *Kitab Pengetahuan Bahasa*, h. 58-57.

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸ Keberagamaan pada intinya adalah kepatuhan seora total kepada Allah, sehingga tidak ada kepatuhan sejati tanpa aclaanya sikap pasrah atau Islam. Lihat Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary* (USA: Amana Corporation, 1989).

*tiadalah ia tak menyempurnakan janji.*⁷⁹

Kedua, adab kepada orang tua dimaksudkan beliau adalah berbakti dan sering meminta nasehat kedua orang tua dalam segala urusan. Hal menarik dari pandangan Raja Ali Haji ini adalah beliau meletakkan keterkaitan etika moral timbal balik antara anak dan orang tua. Bahwa disatu sisi, seorang anak mempunyai kewajiban mematuhi nasehat kedua orang tuanya. Di sisi lain, orang tua juga mempunyai kewajiban untuk memberikan keteladanan prilaku dalam mendidik anaknya. Dalam kaitan ini, Raja Ali Haji mengatakan;

*“Dengan bapak janganlah durhaka, supaya Allah tidak murka; dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat; dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai”*⁸⁰

Ketiga, adab kepada ahli-ahli keluarga yang dimaksud adalah kewajiban bagi kepala rumah tangga untuk menjaga dan memelihara anggota keluarganya dari segala hal yang dapat mengganggu ketentraman dalam kesejahteraan keluarga.⁸¹ Keempat, adab kepada sanak saudara. Raja Ali Haji membagi adab kepada sanak saudara kepada tiga, yang masing-masing harus diperlakukan dengan penuh hormat.⁸² Pertama, sanak saudara karcna akhirat, seperti menuntut ilmu, saling menasehati dalam kebaikan dan sebagainya. Raja Ali Haji memberikan petunjuk praktis terhadap

hal ini sebanyak 19 macam, diantaranya seperti menjaga nama baiknya. Adapun dalam pengertiannya yang kedu adalah sanak saudara karena pekerjaan dunia, seperti berserikat dalam urusan perdagangan, pemerintahan dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah sanak saudara yang tidak mempunyai urusan dunia maupun akhirat dengannya. Kelima, adab kepada orang ‘am yaitu orang lain yang dikenal ataupun tidak, dengan tetap berpegang pada asas kebaikan.

Petunjuk-petunjuk praktis yang diberikan Raja Ali Haji di atas merupakan bukti dari kesungguhannya membangun sistem moral dalam etika pergaulan masyarakat Melayu. Yang menarik di sini adalah pendekatan yang harus dilakukan terhadap bangunan etika Melayu, menurutnya, adalah melalui ilmu dan amal. Karena dengan demikian, segala konsep yang menyangkut tentang etika komunal masyarakat Melayu bisa didekat secara kritis dan rasional, sesuai dengan perkembangan zaman dan tradisi Melayu yang dinamis.

Namun, kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam tradisi Melayu yang berkaitan dengan etika pergaulan masyarakat Malaya tetap beliau pertahankan, dan dengan sendirinya juga berlaku umum. Beliau menyatakan:

*“Jika anak raja sekalipun, jika tiada beradab, bermalu, bersopan, tiada berbahasa, seperti bongkak, pongah tutur katanya, bangsat, sombong, takabur, membesarkan diri tingkah lakunya, jika raja besar sekalipun tiada kelebihannya, kebinaan jualah ia dengannya.”*⁸³

⁷⁹Haji, *Gurindam Dua Belas*.

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹Raja Ali Haji, *Kitab Pengetahuan Bahasa*, h.58-67.

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*

Dalam *Syair Siti Sianah*⁸⁴ dan *Syair Hukum Nikah/Syair Suluh Pegawai*,⁸⁵ Raja Ali Haji berusaha menjelaskan tentang etika perkawinan dalam tradisi Melayu menurut syari'at Islam. Penjelasan yang begitu transparan dan lugas ini memang dimaksudkan oleh Raja Ali Haji sebagai pendidikan seks yang secara jelas digambarkan menurut syari'at Islam. Raja Ali Haji percaya bahwa pendidikan seks tidaklah tabu, bahkan sangat berguna bagi masyarakat Melayu ketika mereka hendak memasuki jenjang perkawinan. Menurut Raja Ali Haji, persoalan tentang etika berumah tangga ini sangat penting bagi masyarakat Melayu demi menjaga nasab, nama baik serta untuk menghindari dari penyimpangan seksual yang mungkin terjadi akibat dekadensi moral yang semakin nyata dan dengan cepat merasuki dinamika tradisi Melayu. Raja Ali Haji menyadari bahwa hal tersebut senantiasa mendapat hambatan, baik secara individual, bermasyarakat maupun bernegara. Oleh karenanya, usaha-usaha keagamaan berupa amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh terhenti dan harus terus-menerus ditegakkan dengan bantuan bimbingan dari para guru yang ahli dibidangnya. Sehingga tergambar dengan jelas bahwa Raja Ali Haji sebenarnya menegaskan bahwa etika Melayu itu bermula dari kesadaran untuk menampilkan dirinya sendiri sesuai dengan petunjuk-petunjuk syari'at.⁸⁶

Dengan demikian, dalam pandangan Raja Ali Haji, pembentukan lingkungan bermoral itu harus segera dimulai agar terciptanya suatu masyarakat Melayu yang bermoral dan ber peradaban. Raja Ali Haji

yakin bahwa kebangkitan peradaban Melayu berarti kebangkitan etika komunal masyarakat Melayu melalui transformasi moral individual.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa etika religius yang dikembangkan oleh Raja Ali Haji merupakan hasil ramuan dari pemahamannya terhadap al-Qur'an dan Sunnah serta memiliki keterkaitan dengan pemikiran-pemikiran teologi Islam sebelumnya yang banyak menghiasi perjalanan sejarah pemikiran Islam klasik. Pemikirannya juga tidak terlepas dari kondisi sosio-kultural-politik zamannya. Dalam kaitannya dengan tradisi Melayu, Raja Ali Haji memberikan empat unsur etika Melayu yang harus diperhatikan, yaitu moralitas penguasa, yang terdiri dari prinsip keadilan, musyawarah dan persamaan, ketaatan pada syari'at, bahasa serta pembentukan lingkungan bermoral. Raja Ali Haji berpendapat, fungsi negara dan kewajiban utama masyarakat adalah menciptakan suasana kondusif bagi pelaksanaan syari'at sehingga tiap individu dapat melaksanakan kewajiban moral dan spiritualnya secara wajar. Raja Ali Haji percaya bahwa kebangkitan peradaban Melayu ditandai dengan kebangkitan etika komunal masyarakat Melayu melalui transformasi moral individual.[]

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Abdullah Yusuf, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary* (USA: Amana Corporation, 1989)

al-Attas, Syed Naquib, *Islam Dalam Sejarah Kebudayaan Melayu* (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1972)

⁸⁴Raja Ali Haji, *Syair Siti Sianah* (Penyengat: Matba'ah al-Ahmadiyah, 1342H).

⁸⁵Raja Ali Haji, *Syair Hukum Nikah / Syair Suluh Pegawai*, ed. by UU Hamidy (Jakarta: Depdikbud, 1990).

⁸⁶*Ibid.*

-
- , *Preliminary Statement On A General Theory of the Islamisation of the Malay Indonesia Archipelago* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1969)
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVI Dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1995)
- Baba, Abdul Ghafar, *Tamadun Melayu* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986)
- Bandur, Agustinus, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014)
- Bogdan, Robert C., and Sari Kboop Biklen, *Qualitative Research for Education, An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, 1982)
- Bruinessan, Martin Van, *Tarekat Naqsabandiyah Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998)
- Fadhli, Siddik, *Membangun Manusia Melayu Muslim* (Jakarta: CIDES, 1993)
- Haji, Raja Ali, *Gurindam Dua Belas*, ed. by E. Nietscer (Batavia)
- , *Kitab Pengetahuan Bahasa*, ed. by Raja Hamzah Yunus (Pekanbaru: Depdikbud, 1986)
- , *Muqaddimah Fi Intizham Wa Wazhaif Al-Mulk* (Penyengat: Maktabah al-Riyawiyah)
- , *Syair Hukum Nikah / Syair Suluh Pegawai*, ed. by UU Hamidy (Jakarta: Depdikbud, 1990)
- , *Syair Siti Stanah* (Penyengat: Matba'ah al-Ahmadiah, 1342H)
- , *Tsamarat Al-Muhimmah* (Penyengat: Maktabah al-Riyawiyah)
- , *Tuhfab Al-Nafis*, ed. by Virginia Matheson (Kuala Lumpur: Fajar Bhakti, 1982)
- Hamid, Ismail, 'Proses Penulisan Sastra Islam Dalam Bahasa Melayu', *Jurnal Persatuan Melayu*, 1 (1995)
- Hasan Junus, *Raja Ali Haji: Budayawan Di Gerbang Abad XX* (Pekanbaru: UIR Press, 1986)
- Hashim, Muhammad Yusof, *Pensejarahan Melayu: Kajian Tentang Sejarah Melayu Nusantara* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992)
- Hooykaas, C, *Perintis Sastra* (Jakarta: ttp, 1951)
- Kerr, Malcom H., *Islamic Reform: The Political and Legal Theory of Muhammad Abdub and Rashid Rida* (London: Cambridge University Press, 1966)
- Kridalaksana, Harimukti, 'Bustanul Katibin Dan Kitab Pengetahuan Bahasa: Sumbangan Raja Ali Haji Dalam Ilmu Bahasa Melayu' (Johor Bahru: Makalah Hari Sasatra, 1993)
- Lanang, Tun Seri, *Sejarah Melayu*, ed. by Shellabear (Kuala Lumpur: Fajar Bhakti, 1922)
- Luthfi, Amir, *Hukum Dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam Di Kesultanan Melayu Siak 1901-1942* (Pekanbaru: Susqa Press, 1991)

-
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990)
- Munsi, Abdullah bin Abdul Kadir, *Hikayat Abdullah* (Jakarta: Perdana Press)
- Mutalib, Hussin, *Islam Dan Etnisitas: Perspektif Politik Melayu* (Jakarta: LP3ES, 1996)
- Nietscher, E., *De Nedberlanders in Johor En Siak*, trans. by Wan Ghalib et.al (Batavia: Bruining and Wijt, 1870)
- Reid, Anthony, ed., *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka*, trans. by Th. Sumarthana (Jakarta: Grafiti Press, 1987)
- Siddik, Abdullah, *Pengantar Undang-Undangan Adat Di Malaysia* (Kuala Lumpur: University Malaya, 1975)
- Sudjiman, Panuti H.M., *Adat Raja-Raja Melayu* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1982)
- Sutrisno, Sulastin, *Hang Tuah: Analisa Struktur Dan Fungsi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983)
- Taylor, Paul W., *Problem of Moral Philosophy* (California: Deckenson Publishing Company, 1985)